



Strategi Kodam III/ Siliwangi Menangani Paham Radikalisme Di Jawa Barat

Hadi Purwanto¹⁾, Djatmoko²⁾, M. Kemalsyah³⁾

Prodi Strategi Dan Kampanye Militer, Universitas Pertahanan RI, Jakarta, Indonesia¹⁾
Sekolah Staf dan Komando Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Bandung, Indonesia²⁾
Prodi Strategi Dan Kampanye Militer, Universitas Pertahanan RI, Jakarta, Indonesia³⁾

Koresponding author : skmjurnal@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Strategi Kodam III/ Siliwangi Menangani Paham Radikalisme Di Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fondasi utama. Kodam III/Siliwangi dapat memperkuat pencegahan radikalisme di Jawa Barat melalui beberapa strategi terintegrasi. Pertama, pemanfaatan teknologi digital seperti big data analytics dan sistem pengawasan berbasis digital memungkinkan deteksi dan pencegahan radikalisasi yang lebih efektif. Teknologi ini mendukung pemantauan real-time dan analisis data untuk mendeteksi ancaman secara lebih akurat, namun membutuhkan dukungan infrastruktur dan pelatihan personel. Kedua, program Kemanunggalan TNI dengan Rakyat meningkatkan hubungan antara TNI dan masyarakat, mengedukasi tentang bahaya radikalisme, dan mendorong partisipasi aktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan. Pendekatan ini memperkuat pengawasan lokal dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda. Ketiga, sinergi dengan Polri, BIN, dan pemerintah daerah memperkuat implementasi kebijakan anti-terorisme melalui koordinasi penegakan hukum dan pemanfaatan intelijen. Sinergi ini juga mendukung kebijakan hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme. Keempat, kerjasama internasional, termasuk pelatihan bersama dan pertukaran pengetahuan, meningkatkan kapasitas personel Kodam III/Siliwangi dalam kontra-terorisme. Kerjasama ini juga melibatkan pertukaran informasi intelijen untuk mendeteksi ancaman lintas batas. Terakhir, kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan keagamaan untuk mencegah radikalisme melalui program edukasi dan kampanye kesadaran memperkuat nilai toleransi dan kebangsaan. Evaluasi berkala terhadap program-program ini penting untuk memastikan efektivitas dan penyesuaian strategi. Pendekatan holistik ini memperkuat keamanan dan stabilitas di Jawa Barat.

Kata kunci: Strategi; Terorisme; Lone Wolf Terrorism

Abstract

West Java faces complex terrorism challenges due to the presence of terrorist networks such as Darul Islam, Jemaah Islamiyah, and Jamaah Ansharut Daulah. The main threats include acts of terror by individuals (lone wolves) and recidivism, where terrorists return to action after serving their sentences. Several terror cases involve recidivists who are involved in repeated attacks even though they have served their prison sentences. The involvement of international terrorist networks, such as ISIS, worsens the situation by spreading radicalization through social media. Law enforcement needs to focus on early detection and prevention to effectively address this threat. The purpose of this study is to analyze the Strategy of Kodam III/Siliwangi in Handling Radicalism in West Java. The method used is descriptive qualitative using the SWOT approach. The results of the study indicate that the main foundation of Kodam III/Siliwangi can strengthen the prevention of radicalism in West Java through several integrated strategies. First, the use of digital technology such as big data analytics and digital-based surveillance systems allows for more effective detection and prevention of radicalization. This technology supports real-time monitoring

and data analysis to detect threats more accurately, but requires infrastructure support and personnel training. Second, the TNI-People Unity program improves relations between the TNI and the community, educates about the dangers of radicalism, and encourages active participation in reporting suspicious activities. This approach strengthens local surveillance by involving community leaders and youth. Third, synergy with the National Police, BIN, and local governments strengthens the implementation of anti-terrorism policies through coordination of law enforcement and intelligence utilization. This synergy also supports legal policies and increases public awareness of the threat of terrorism. Fourth, international cooperation, including joint training and knowledge exchange, increases the capacity of Kodam III/Siliwangi personnel in counter-terrorism. This cooperation also involves the exchange of intelligence information to detect cross-border threats. Finally, collaboration with educational and religious institutions to prevent radicalism through educational programs and awareness campaigns strengthens the values of tolerance and nationality. Periodic evaluation of these programs is important to ensure effectiveness and adjustment of strategies. This holistic approach strengthens security and stability in West Java.

Key words: Strategy; Terrorism; Lone Wolf Terrorism

PENDAHULUAN

Jawa Barat, sebagai provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, menjadi basis utama jaringan teroris dan rawan terhadap lone wolf terrorism, yaitu aksi teror oleh individu tanpa dukungan organisasi. Ancaman ini menambah kompleksitas penanggulangan terorisme, mengingat serangan individu lebih sulit dideteksi dan dicegah dibandingkan serangan kelompok. Provinsi Jawa Barat memiliki sejarah panjang terkait dengan aktivitas kelompok teroris yang signifikan di Indonesia. Beberapa organisasi yang menonjol di wilayah ini antara lain Darul Islam (DI), Jamaah Islamiyah (JI), dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Darul Islam, didirikan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pada tahun 1949, bertujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) dengan memaksakan penerapan syariat Islam secara menyeluruh, serta melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Indonesia. Kelompok ini kemudian memengaruhi munculnya Jamaah Islamiyah (JI), yang lahir dari faksi Darul Islam. Dipimpin oleh Abdullah Sungkar, JI terlibat dalam berbagai serangan teroris besar di Indonesia, termasuk bom Bali dan sejumlah serangan di Jakarta, dengan afiliasi erat pada jaringan global Al-Qaeda. Kemudian muncul Jamaah Ansharut Daulah (JAD), afiliasi ISIS di Indonesia, yang dipimpin oleh Aman Abdurrahman. JAD bertanggung jawab atas berbagai serangan bom, terutama dengan penggunaan bahan peledak seperti Triacetone Triperoxide (TATP). Kelompok ini aktif di beberapa daerah di Jawa Barat dan memanfaatkan media sosial sebagai alat utama untuk penyebaran radikalisme serta rekrutmen anggota baru (Supriyadi, 2020). Berikut adalah tabel yang merangkum data mengenai beberapa kasus terorisme di wilayah Jawa Barat yang melibatkan residivis:

Tabel 1 Kasus Terorisme Jawa Barat

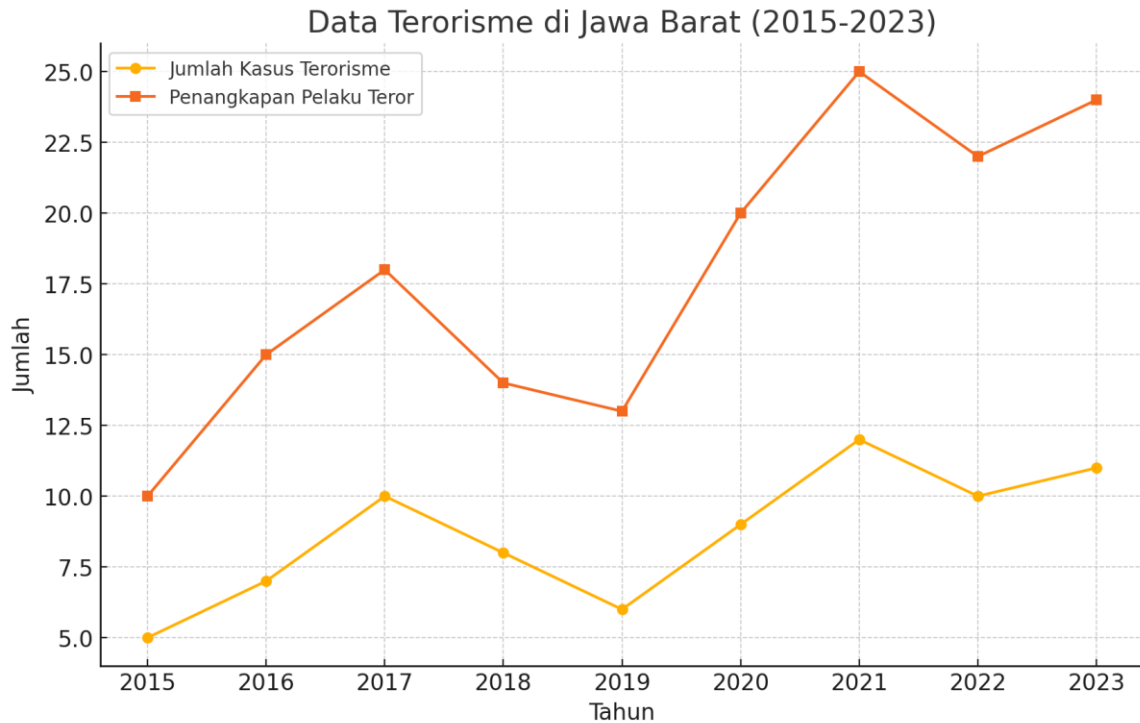
Nama/Inisial	Kasus Terorisme	Penangkapan dan Hukuman
Aman Abdurrahman	Terlibat dalam Bom Cimanggis Depok (2004), pendanaan pelatihan militer Aceh (2010), dan serangan-serangan teror JAD (2016-2017).	Ditangkap tiga kali, dihukum 7 tahun (2004), 9 tahun (2010), dan vonis mati pada 2018 terkait keterlibatannya dalam jaringan JAD.
Yayat Cahdiyati	Aksi perampokan di Cikampek (2009), pelatihan militer Aceh (2010), bom bunuh diri di Taman Pendawa Bandung (2017).	Ditangkap pertama kali pada 2012 dan dihukum, bebas pada 2015, kembali melakukan bom bunuh diri pada 2017.
Agus Sujatno	Terlibat dalam jaringan JAD Bandung, bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Bandung (2022).	Ditangkap pada 2017, bebas pada 2021, kembali melakukan aksi bom bunuh diri pada 2022.

MI	Kasus Bom Cibiru (2010), terlibat bom Kampung Melayu Jakarta Timur (2017).	Ditangkap pada 2010, bebas pada 2015, ditangkap kembali pada 2017, dan divonis 9 tahun penjara. Bebas pada 2022.
HK	Terlibat bom Masjid Adz-Zikro Polresta Cirebon (2011), terlibat kerusuhan di Rutan Mako Brimob (2018).	Ditangkap pada 2011 dan 2018, menjalani hukuman penjara selama 4 tahun 8 bulan, dan kembali terlibat dalam kasus pada 2018.
BA	Terlibat dalam bom Masjid Adz-Zikro (2011), kembali terlibat dalam perencanaan aksi teror di Cirebon (2019).	Dihukum 4 tahun penjara, bebas pada 2015, kembali ditangkap pada 2019 karena keterlibatan dalam aksi teror lainnya.
YS alias AA	Kasus bom Masjid Adz-Zikro (2011), berupaya bergabung dengan ISIS di Suriah (2017).	Bebas pada 2014, ditangkap kembali pada 2017 setelah dideportasi dari Turki, menjalani hukuman 4 tahun 8 bulan, dan bebas pada 2022.
S	Terlibat perencanaan serangan oleh jaringan JAD saat kerusuhan di Rutan Mako Brimob (2018), kembali ditangkap pada 2023.	Dihukum 3 tahun penjara, bebas pada 2021, ditangkap kembali pada 2023 karena terlibat perencanaan aksi teror oleh kelompok Abu Omar.
AJM	Terlibat dalam ujaran kebencian terhadap Kapolri (2017), bergabung dengan jaringan JAD Garut (2021).	Ditangkap pada 2017 saat berusia 15 tahun, ditangkap kembali pada 2021 karena terlibat perencanaan aksi teror.
YS alias K	Terlibat dalam aksi bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar Bandung (2022).	Ditangkap pada 2015, bebas pada 2018, dan kembali ditangkap pada 2022 setelah terlibat dalam aksi bom bunuh diri.

Sumber : Irawan et al (2024)

Tabel ini menyoroti pola keterlibatan residivis dalam aksi terorisme di Jawa Barat, dengan fokus pada beberapa individu yang terus melakukan aksi teror meskipun sudah menjalani hukuman. Salah satu aspek utama yang menonjol adalah keterlibatan berulang dalam aksi terorisme, di mana beberapa pelaku seperti Aman Abdurrahman dan Yayat Cahdiyati kembali melakukan teror setelah dibebaskan. Pola ini menandakan bahwa hukuman penjara tidak selalu berhasil memutus siklus radikalisme bagi pelaku teror. Selain itu, jaringan teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) menjadi faktor penting dalam aksi teror yang dilakukan oleh residivis ini. Jaringan ini aktif di berbagai wilayah Jawa Barat, termasuk Bandung, Cirebon, dan Sukabumi, yang menunjukkan kemampuan mereka untuk merekrut dan menggerakkan aksi-aksi teror melalui afiliasi dan hubungan lintas kota.

Deradikalisasi menjadi tantangan signifikan, seperti yang terlihat dalam kasus Agus Sujatno dan YS alias K, di mana mereka kembali terlibat dalam aksi teror setelah bebas. Hal ini menunjukkan bahwa program rehabilitasi dan pengawasan paska-pembebasan belum mampu sepenuhnya menangani ancaman residivisme terorisme. Usia muda juga menjadi faktor penting, dengan beberapa pelaku seperti AJM dan FL terlibat dalam aksi terorisme sejak usia sangat muda, yang mengindikasikan kerentanan generasi muda terhadap ideologi radikal. Terakhir, keterlibatan YS alias AA dalam upaya bergabung dengan ISIS di Suriah menunjukkan adanya pengaruh jaringan teror internasional dalam dinamika terorisme di Indonesia, yang memperluas spektrum ancaman dari tingkat lokal ke global.



Grafik 1 Data Terorsme d Jawa Barat
Sumber : Irawan et al (2024)

Tren penangkapan pelaku teror di Jawa Barat menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun 2015 hingga 2023, dengan peningkatan penangkapan di beberapa tahun kunci. Pada tahun 2015, angka penangkapan berada di titik terendah sekitar 10 kasus, kemudian meningkat tajam dan mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan lebih dari 25 kasus penangkapan. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2022, tren kembali naik pada tahun 2023, menunjukkan bahwa meskipun sempat menurun, upaya penegakan hukum terhadap pelaku teror terus diintensifkan.

Jumlah kasus terorisme, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan jumlah penangkapan, juga mengalami pola yang fluktuatif. Pada tahun 2015, terdapat sekitar 5 kasus, dan jumlah ini meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan sekitar 10 kasus. Seiring dengan penurunan pada tahun 2022, jumlah kasus terorisme kembali mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa insiden terorisme cenderung relatif stabil, meskipun terdapat perbedaan dengan jumlah penangkapan.

Dari hubungan antara penangkapan dan kasus terorisme, terlihat bahwa jumlah penangkapan sering kali lebih tinggi daripada jumlah kasus terorisme yang terjadi. Terutama pada tahun 2021, ketika penangkapan melonjak sementara jumlah kasus terorisme relatif lebih rendah. Ini mungkin mencerminkan keberhasilan operasi pencegahan oleh pihak berwenang, yang mampu mengidentifikasi dan menindak jaringan teroris lebih awal sebelum mereka melakukan serangan. Keberhasilan ini dapat disebabkan oleh peningkatan efektivitas operasi penegakan hukum atau kebijakan yang lebih aktif dalam menangani ancaman terorisme di wilayah tersebut.

Puncak kegiatan terorisme dan penangkapan pada tahun 2021 juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, termasuk dinamika politik dan geopolitik, serta perubahan dalam strategi pemerintah dalam menanggulangi terorisme. Peningkatan kegiatan teroris mungkin juga berkaitan dengan radikalisasi kelompok tertentu, yang pada saat yang sama mendorong peningkatan respons dari penegak hukum. Secara keseluruhan, efektivitas penegakan hukum dapat dilihat dari tingginya jumlah penangkapan dibandingkan jumlah kasus terorisme, yang mengindikasikan adanya upaya pencegahan yang efektif. Penangkapan dini terhadap jaringan



teroris yang sedang berkembang menjadi bukti bahwa upaya pengawasan dan penindakan semakin ditingkatkan untuk meminimalisir serangan. Meskipun demikian, tren ini juga menunjukkan bahwa tantangan terorisme masih tetap ada dan membutuhkan upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

Melihat banyaknya kejahatan terorisme, maka perlu dilakukan counter terrorism atau perang global melawan terorisme. Terdapat beberapa pendekatan, Ad'ha Aljunied (2011) menjelaskan ada dua pendekatan utama dalam perang global melawan terorisme. Pertama, pendekatan keras (Hard Approach), memerlukan keterlibatan fisik yang melumpuhkan rencana destruktif teroris, seperti pengeboman. Melalui legislatif, yudikatif dan eksekutif yang menunjukkan perang negara melawan terorisme, negara modern menggunakan metode seperti penangkapan, pengawasan, intelijen dan penahanan untuk melumpuhkan inisiatif para teroris. Kedua, pendekatan lunak (Soft Approach), merupakan upaya untuk merendahkan ideologi teroris melalui wacana kontra ideologi, terhadap ideologi radikal yang mendorong kekerasan politik. Di sisi yang lain, atas banyaknya kejadian aksi teror dan terorisme di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 dalam rangka menanggulangi tindakan terorisme. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor : Kep-26/Menko/Polkam/11/2002 dibentuklah Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) dengan tugas membantu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam merumuskan kebijakan bagi pemberantasan tindak pidana terorisme, meliputi : penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian penyelesaian, dan segala tindakan hukum yang diperlukan.

Jawa Barat tetap menjadi wilayah strategis bagi aktivitas terorisme, dan upaya penindakan oleh aparat keamanan. Seiring dengan berkembangnya ancaman dari jaringan teroris lokal dan internasional, Kodam III/Siliwangi, sebagai komando teritorial yang bertanggung jawab di wilayah Jawa Barat, memiliki peran penting dalam menangani paham radikalisme di daerah tersebut. Artikel ini membahas strategi yang diterapkan oleh Kodam III/Siliwangi dalam menghadapi dan menanggulangi paham radikalisme di Jawa Barat, yang mencakup aspek pencegahan, penindakan, serta pemulihan.

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan peran dan strategi Kodam III/Siliwangi dalam menangani paham radikalisme di Jawa Barat berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tinjauan pustaka dan studi dokumen, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto (1998). Peneliti menelaah informasi sekunder dari berbagai sumber, termasuk dokumen resmi, kebijakan pemerintah, dan strategi militer yang relevan dalam upaya kontra-radikalisme (B. Waluyo, 1996). Analisis SWOT digunakan sebagai alat utama untuk mengevaluasi strategi Kodam III/Siliwangi dalam menghadapi ancaman radikalisme di wilayah tersebut. Analisis ini membantu menyusun strategi operasional Kodam III/Siliwangi guna menekan penyebaran radikalisme di Jawa Barat.

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka berfokus pada regulasi terkait pencegahan radikalisme, peran Kodam III/Siliwangi sebagai aktor militer di daerah, serta upaya strategis yang dilakukan oleh TNI dalam menghadapi paham radikalisme. Peneliti mengkaji kebijakan nasional terkait keamanan, seperti Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme, serta pendekatan yang diterapkan oleh Kodam III/Siliwangi dalam mendeteksi dan mengantisipasi penyebaran radikalisme di wilayah tersebut. Penggunaan Analisis SWOT bertujuan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas Kodam III/Siliwangi dalam menangani radikalisme.

Pada aspek Strengths (Kekuatan), Kodam III/Siliwangi memiliki keunggulan berupa kekuatan militer yang terstruktur, keahlian dalam operasi teritorial, serta dukungan dari jaringan intelijen TNI yang luas di daerah. Selain itu, kemampuan untuk bekerja sama dengan Polri dan instansi pemerintah daerah dalam operasi gabungan juga menjadi kekuatan yang mendukung. Namun, terdapat Weaknesses (Kelemahan) seperti keterbatasan sumber daya manusia yang



terlatih secara khusus dalam menangani isu radikalisme, serta tantangan dalam menjalankan program deradikalisasi yang melibatkan masyarakat secara langsung. Di sisi lain, Opportunities (Peluang) muncul dari adanya dukungan kebijakan nasional yang tegas terkait penanggulangan radikalisme dan terorisme, serta dukungan dari organisasi masyarakat sipil dalam upaya pencegahan paham radikal. Namun, Threats (Ancaman) yang dihadapi Kodam III/Siliwangi termasuk peningkatan penggunaan media sosial oleh kelompok radikal untuk menyebarkan ideologi mereka, serta keterkaitan dengan jaringan radikal internasional yang memperbesar potensi ancaman di wilayah Jawa Barat.

Proses analisis data dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah penting yang dilakukan secara sistematis. Langkah pertama adalah reduksi data, di mana peneliti menyaring informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan peran Kodam III/Siliwangi dalam penanganan paham radikalisme. Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara sistematis melalui grafik, tabel, atau peta untuk menggambarkan tren radikalisme di Jawa Barat serta langkah-langkah yang telah diambil oleh Kodam III/Siliwangi. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis SWOT untuk menyusun rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan efektivitas Kodam III/Siliwangi dalam menangani paham radikalisme, memperkuat kerja sama antar-lembaga, serta meningkatkan peran Kodam dalam pendekatan preventif dan deradikalisasi di wilayah tersebut.

Dalam upaya penyusunan strategi Kodam III/Siliwangi dalam menangani radikalisme di Jawa Barat, analisis ini memberikan pemahaman mendalam mengenai tantangan dan peluang yang ada. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat mendukung Kodam III/Siliwangi dalam mengembangkan sistem pengamanan teritorial yang lebih responsif dan proaktif, serta memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kodam III/ Siliwangi

Kodam III/Siliwangi memiliki peran penting dalam menangani paham radikalisme di Jawa Barat, sebuah wilayah yang rentan terhadap penyebaran ideologi ekstremis. Peran Kodam III/Siliwangi tidak hanya terbatas pada kekuatan militer, tetapi juga melibatkan pendekatan teritorial, penggalangan masyarakat, dan sinergi dengan instansi lain dalam upaya mencegah radikalisme yang dapat mengancam stabilitas keamanan nasional. Berikut adalah beberapa peran utama Kodam III/Siliwangi dalam menangani paham radikalisme di Jawa Barat:

1. Operasi Teritorial dan Kemanunggalan TNI dengan Rakyat

Kodam III/Siliwangi menggunakan pendekatan operasi teritorial untuk menggalang masyarakat dalam menangkal penyebaran radikalisme. Operasi ini melibatkan program-program seperti *Pembinaan Teritorial* (Binter) yang bertujuan untuk mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, Kodam III/Siliwangi berupaya memperkuat kesadaran masyarakat akan bahaya radikalisme dan pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam operasi teritorial, para Babinsa (Bintara Pembina Desa) berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, tentang ancaman radikalisme. Mereka juga berfungsi sebagai mata dan telinga TNI di lapangan, memberikan laporan intelijen dini tentang potensi ancaman di wilayah masing-masing. Dengan demikian, Kodam III/Siliwangi dapat melakukan deteksi dini terhadap individu atau kelompok yang terindikasi menyebarkan paham radikal.

2. Edukasi dan Program Deradikalisasi

Salah satu pendekatan yang digunakan oleh Kodam III/Siliwangi dalam menangani radikalisme adalah dengan melakukan program edukasi dan deradikalisasi. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya generasi muda, tentang bahaya ideologi radikal. Kodam III/Siliwangi bekerja sama dengan sekolah, universitas, organisasi

masyarakat, dan pesantren dalam menyelenggarakan seminar, diskusi, serta pelatihan tentang pentingnya nasionalisme dan toleransi beragama.

Selain itu, Kodam III/Siliwangi berperan dalam mendukung program deradikalisasi yang dijalankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Salah satu contoh konkret adalah rehabilitasi dan reintegrasi mantan narapidana terorisme ke masyarakat. Dalam hal ini, Kodam III/Siliwangi turut membantu dalam proses pembinaan dan pemantauan agar mereka tidak kembali terpapar paham radikal.

3. Pendekatan Intelijen dan Penggalangan Informasi

Kodam III/Siliwangi memiliki peran penting dalam penggalangan informasi dan kegiatan intelijen untuk mengidentifikasi dan memonitor individu atau kelompok yang terlibat dalam penyebaran paham radikalisme. Melalui kerjasama dengan Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan instansi terkait lainnya, Kodam III/Siliwangi melakukan operasi intelijen yang bertujuan untuk mendeteksi sejak dini aktivitas kelompok radikal, baik yang bersifat lokal maupun terhubung dengan jaringan internasional.

Kodam III/Siliwangi juga memanfaatkan perkembangan teknologi dalam menjalankan operasi intelijen, termasuk penggunaan media sosial untuk memonitor propaganda radikal yang menyebar di kalangan masyarakat. Dengan pendekatan ini, TNI mampu menangkal penyebaran ideologi radikal yang sering kali dilakukan melalui platform digital.

4. Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah

Peran Kodam III/Siliwangi dalam menangani radikalisme juga diwujudkan melalui sinergi dengan aparat penegak hukum seperti Polri, serta pemerintah daerah di Jawa Barat. Kolaborasi ini penting dalam memperkuat upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran radikalisme dan terorisme. Dalam operasi gabungan dengan Polri, Kodam III/Siliwangi turut serta dalam menangkap dan menindak kelompok terorisme yang memiliki afiliasi dengan jaringan radikal.

Kerjasama dengan pemerintah daerah dilakukan untuk menciptakan kebijakan pencegahan yang komprehensif, seperti program deradikalisasi di tingkat desa dan kecamatan. Pemerintah daerah juga berperan dalam memberikan fasilitas dan dukungan bagi Kodam III/Siliwangi untuk menjalankan program-program pencegahan radikalisme di wilayah Jawa Barat.

5. Peningkatan Kapasitas Personel dan Pelatihan

Kodam III/Siliwangi juga fokus pada peningkatan kapasitas personel dalam menangani ancaman radikalisme. Pelatihan yang diberikan kepada prajurit, khususnya di bidang intelijen, pencegahan terorisme, dan komunikasi sosial, bertujuan agar mereka lebih efektif dalam menjalankan tugas di lapangan. Pelatihan ini meliputi pemahaman tentang metode perekrutan kelompok radikal, teknik deteksi dini, dan cara berinteraksi dengan masyarakat yang rentan terpapar ideologi ekstrem.

Selain pelatihan internal, Kodam III/Siliwangi juga bekerja sama dengan instansi internasional dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani ancaman global yang berkaitan dengan radikalisme, termasuk kerjasama dengan pasukan internasional dalam konteks keamanan regional.

6. Pencegahan dan Penanganan di Sektor Pendidikan dan Keagamaan

Kodam III/Siliwangi juga aktif dalam upaya pencegahan radikalisme di sektor pendidikan dan keagamaan. Jawa Barat sebagai daerah yang memiliki banyak pesantren dan lembaga pendidikan agama menjadi wilayah strategis bagi kelompok radikal untuk menyebarkan ideologi mereka. Oleh karena itu, Kodam III/Siliwangi berkolaborasi dengan Kementerian Agama, institusi pendidikan, dan para pemuka agama dalam memastikan bahwa ajaran radikal tidak masuk ke dalam kurikulum atau aktivitas keagamaan di wilayah tersebut.

Upaya pencegahan ini dilakukan melalui penyuluhan agama yang moderat dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan yang dicurigai terpapar paham radikal. Kodam III/Siliwangi juga mendukung program "Bela Negara" yang diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan sebagai salah satu cara untuk membangun kesadaran nasionalisme di kalangan pelajar.



7. Penanganan Radikalisme melalui Media dan Propaganda Positif

Dalam era digital, penyebaran radikalisme sering kali dilakukan melalui media sosial dan platform online lainnya. Kodam III/Siliwangi memiliki peran strategis dalam melawan propaganda radikal dengan memanfaatkan media sebagai alat untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan membangun narasi kontra-radikalisme. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kampanye *Bela Negara* dan pelibatan tokoh masyarakat serta influencer lokal dalam menyebarkan pesan persatuan dan kebhinekaan.

Kodam III/Siliwangi juga berkolaborasi dengan media massa untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan TNI dalam menjaga keamanan dan stabilitas, sehingga masyarakat dapat lebih memahami peran penting yang dimainkan oleh militer dalam melindungi wilayah mereka dari ancaman ideologi ekstrem.

Secara keseluruhan, peran Kodam III/Siliwangi dalam menangani paham radikalisme di Jawa Barat mencakup pendekatan multi-sektoral yang melibatkan operasi teritorial, intelijen, kerjasama dengan penegak hukum, program edukasi, serta penggunaan media sebagai alat propaganda positif. Sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam mengatasi ancaman radikalisme di wilayah yang strategis ini. Melalui langkah-langkah tersebut, Kodam III/Siliwangi terus berupaya untuk mencegah penyebaran radikalisme dan memastikan stabilitas keamanan di Jawa Barat.

B. Terorisme di Jawa Barat

Berdasarkan penilaian Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Jawa Barat, wilayah ini telah dianggap sebagai salah satu wilayah dengan tingkat ancaman terorisme yang cukup tinggi dalam satu dekade terakhir. Wilayah Jawa Barat kerap disebut sebagai "supermarket pelaku terorisme" karena beragamnya peran yang dimainkan oleh individu dan kelompok yang terlibat dalam berbagai kegiatan terorisme. Para pelaku terorisme di Jawa Barat tidak hanya berperan sebagai eksekutor yang melancarkan serangan, tetapi juga mencakup ideolog yang menyebarkan paham radikalisme, penyandang dana yang mendukung secara finansial, serta pemberi fasilitas yang memfasilitasi operasi mereka.

Dalam konteks Jawa Barat, jaringan terorisme memiliki akar yang kuat dan menyebar ke berbagai wilayah, termasuk di daerah-daerah seperti Indramayu, Bandung Raya, Priangan Timur, serta wilayah Bogor, Depok, Bekasi, dan Karawang (Bodebek). Hal ini menunjukkan bahwa ancaman terorisme tidak hanya bersifat lokal tetapi juga mencakup skala regional dan bahkan nasional, mengingat keterkaitan antara kelompok-kelompok ini dengan jaringan teroris internasional seperti ISIS dan Jemaah Islamiyah.

1. Indramayu sebagai Pusat Pergerakan. Indramayu dikenal sebagai salah satu wilayah yang menjadi basis penting bagi kelompok radikal. Pengaruh ideologi radikal sering kali ditemukan melalui kegiatan keagamaan yang menyimpang dari ajaran moderat, serta adanya pemahaman yang salah tentang jihad. Wilayah ini menjadi strategis karena aksesnya yang mudah ke berbagai kota besar di Pulau Jawa, menjadikannya lokasi yang ideal untuk pelatihan dan rekrutmen teroris.
2. Bandung Raya dan Priangan Timur sebagai Lokasi Operasional. Bandung Raya dan Priangan Timur juga menjadi titik penting dalam aktivitas terorisme. Dengan populasi yang besar dan kepadatan penduduk yang tinggi, kawasan ini menjadi lahan subur bagi penyebaran paham radikalisme. Beberapa serangan terorisme di masa lalu, seperti bom bunuh diri di Bandung, menunjukkan bahwa wilayah ini tidak hanya menjadi lokasi penyebaran ideologi tetapi juga sebagai lokasi eksekusi serangan.
3. Bodebek sebagai Jalur Mobilisasi. Wilayah Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi, dan Karawang) berperan penting sebagai jalur mobilisasi teroris. Dekatnya wilayah ini dengan ibu kota Jakarta membuat Bodebek menjadi lokasi transit bagi para pelaku teror yang berencana melancarkan serangan di ibu kota atau kota-kota besar lainnya. Konektivitas transportasi yang baik dan tingkat urbanisasi yang tinggi membuat wilayah ini rawan digunakan sebagai basis operasi.

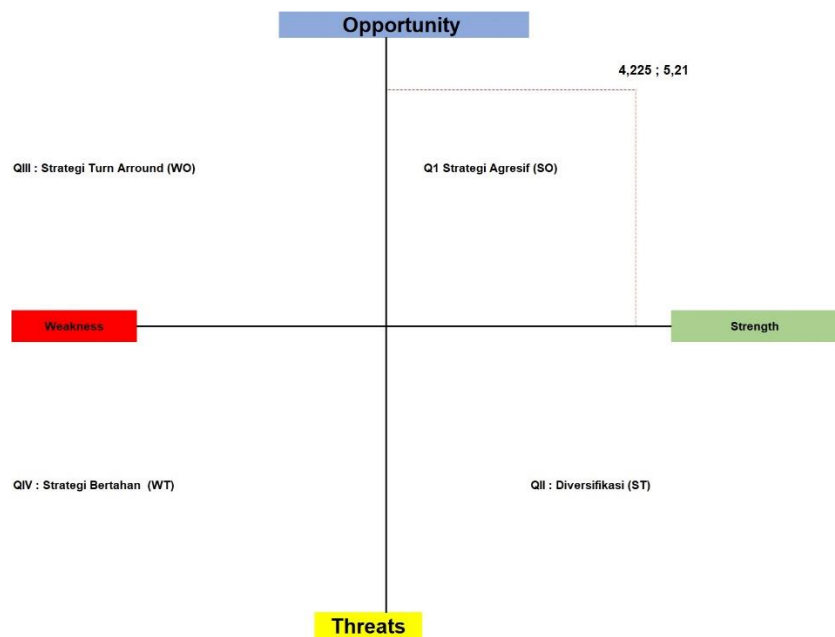
Ancaman terorisme di Jawa Barat diperkuat oleh beberapa faktor, termasuk kondisi sosial-ekonomi yang kurang menguntungkan, ketimpangan pendidikan, dan mudahnya akses ke materi radikal melalui internet dan media sosial. Propaganda teroris yang disebarakan secara daring telah menjadi alat yang efektif untuk merekrut anggota baru, terutama di kalangan anak muda yang merasa tidak puas dengan keadaan sosial mereka. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap moderasi dalam agama turut memperkuat pengaruh ideologi radikal di beberapa kalangan. Untuk mengidentifikasi strategi maka digunakan analisa SWOT berikut :

Tabel 2 IFAS (Internal Factor Analysis Summary) dan analisis EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary)

STRENGTH	OPPORTUNITIES
<ul style="list-style-type: none">• Jaringan Teritorial yang Luas: Kodam III/Siliwangi memiliki jaringan Babinsa (Bintara Pembina Desa) yang tersebar di seluruh pelosok Jawa Barat, memungkinkan deteksi dini terhadap penyebaran paham radikal.• Kedekatan dengan Masyarakat: Melalui program Kemanunggalan TNI dengan Rakyat, Kodam III/Siliwangi memiliki hubungan baik dengan masyarakat, memudahkan pendekatan soft power dalam pencegahan radikalisme.• Pengalaman dan Kompetensi Personel: Kodam III/Siliwangi memiliki personel yang terlatih dalam operasi intelijen dan kontra-terorisme, serta berpengalaman dalam menjaga stabilitas wilayah.• Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum: Kodam III/Siliwangi memiliki kerjasama erat dengan Polri, BIN, dan pemerintah daerah dalam menangani ancaman radikalisme, memperkuat efektivitas operasi.• Kemampuan Operasional yang Kuat: Kodam III/Siliwangi memiliki kemampuan operasional yang baik dalam menjalankan operasi gabungan, baik dalam operasi intelijen maupun penindakan langsung terhadap kelompok radikal.	<ul style="list-style-type: none">• Dukungan Kebijakan Nasional: Penguatan undang-undang dan regulasi anti-terorisme, seperti UU No. 5 Tahun 2018, memberikan dasar hukum yang kuat bagi Kodam III/Siliwangi dalam menangani radikalisme.• Pemanfaatan Teknologi Digital: Teknologi baru seperti big data analytics dan sistem pengawasan berbasis digital dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas deteksi dan pencegahan penyebaran radikalisme.• Partisipasi Masyarakat: Adanya kesadaran yang meningkat di kalangan masyarakat akan bahaya radikalisme membuka peluang untuk pelibatan lebih aktif masyarakat dalam program pencegahan radikalisme.• Kerjasama Internasional: Kodam III/Siliwangi dapat menjalin kerjasama dengan lembaga internasional dan negara lain dalam memperkuat kapasitas dalam menangani ancaman radikalisme global.• Penguatan Peran Pendidikan dan Keagamaan: Bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan agama untuk memperkuat nilai-nilai nasionalisme dan toleransi guna mencegah paham radikal.
WEAKNESS	THREATS

<ul style="list-style-type: none">• Keterbatasan Sumber Daya Teknologi: Masih adanya keterbatasan infrastruktur teknologi dalam pemantauan dan deteksi dini ancaman radikalisme, terutama di daerah terpencil.• Kurangnya Koordinasi Antar-Lembaga: Meskipun ada sinergi, masih terdapat kendala dalam koordinasi antar-institusi di tingkat lokal yang terkadang menghambat penanganan radikalisme secara komprehensif.• Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Kodam III/Siliwangi memiliki keterbatasan personel khusus yang terlatih dalam menangani radikalisme secara spesifik, terutama dalam operasi intelijen dan kontra-terorisme.• Hambatan Birokrasi: Proses birokrasi dalam pelaksanaan operasi terkadang memperlambat respons terhadap ancaman radikalisme yang bersifat dinamis dan cepat berkembang.• Fokus pada Pendekatan Militeristik: Pendekatan militeristik terkadang kurang efektif dalam menangani paham radikalisme yang membutuhkan pendekatan kultural, sosial, dan ekonomi.	<ul style="list-style-type: none">• Munculnya Jaringan Radikal Baru: Kelompok radikal di Jawa Barat dapat terus berevolusi dan membentuk jaringan baru yang lebih sulit dideteksi.• Penggunaan Teknologi oleh Kelompok Radikal: Kelompok radikal semakin memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk menyebarkan ideologi mereka, yang membuat pengawasan semakin kompleks.• Radikalisasi di Kalangan Generasi Muda: Radikalisasi pada generasi muda, terutama di lingkungan pendidikan dan keagamaan, terus menjadi ancaman serius yang sulit untuk ditangani hanya dengan pendekatan militer.• Resistensi Sosial dan Politik: Di beberapa wilayah, terdapat resistensi sosial atau politik terhadap kehadiran militer yang dinilai kurang sesuai dalam konteks pencegahan radikalisme.• Pengaruh Eksternal: Pengaruh dari kelompok radikal global seperti ISIS dan afiliasinya bisa memperkuat jaringan radikal lokal dan meningkatkan risiko serangan di wilayah Jawa Barat.
--	---

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2024



Grafik 2 Matriks SWOT Analisis
Sumber : Data Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh peneliti diperoleh strategi agresif (*strength opportunity*) berikut :

1. Penguatan Jaringan Teritorial melalui Pemanfaatan Teknologi Digital

Kodam III/Siliwangi memiliki jaringan Babinsa (Bintara Pembina Desa) yang tersebar di seluruh pelosok Jawa Barat, memberikan kekuatan penting dalam menangani radikalisme. Dengan jaringan teritorial yang luas, Kodam dapat memanfaatkan teknologi digital, seperti big data analytics dan sistem pengawasan berbasis digital, untuk meningkatkan efektivitas deteksi dini dan pencegahan penyebaran paham radikal. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan Kodam melakukan monitoring yang lebih komprehensif dan real-time terhadap potensi ancaman radikal di berbagai wilayah yang rentan terhadap infiltrasi radikalisme (Atran et al., 2023)

Teknologi big data analytics memberikan kemampuan analisis data dalam skala besar, yang memungkinkan identifikasi pola-pola perilaku atau aktivitas mencurigakan di masyarakat yang mungkin terkait dengan penyebaran paham radikal. Dalam konteks jaringan Babinsa, data yang dikumpulkan dari lapangan oleh para Babinsa dapat dianalisis secara terpusat melalui sistem yang terintegrasi. Proses ini memungkinkan deteksi potensi ancaman secara lebih cepat, akurat, dan efisien dibandingkan metode tradisional yang mengandalkan laporan manual atau prosedur yang lebih lambat (Berger et al., 2022).

Selain itu, sistem pengawasan berbasis digital dapat digunakan untuk mengawasi perkembangan situasi di daerah-daerah rawan radikalisme. Sistem ini mencakup penggunaan perangkat lunak pemantauan, CCTV, drone, dan teknologi sensor yang dapat mengidentifikasi aktivitas mencurigakan atau pergerakan kelompok yang berpotensi menyebarkan ideologi radikal. Misalnya, penggunaan teknologi drone dapat membantu pengawasan di daerah yang sulit dijangkau secara fisik oleh personel Kodam. Dengan demikian, pemetaan wilayah-wilayah rawan dapat dilakukan lebih efektif, membantu Kodam dalam menentukan strategi dan alokasi sumber daya yang tepat (Brown, 2019).

Teknologi juga memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antara Babinsa dengan komando pusat di Kodam III/Siliwangi. Melalui sistem komunikasi digital yang canggih, Babinsa dapat langsung melaporkan perkembangan di lapangan kepada markas besar secara real-time. Informasi tersebut dapat segera dianalisis untuk merespons potensi ancaman secara cepat. Ini sangat penting dalam upaya menghadapi radikalisme yang berkembang dinamis dan memanfaatkan celah komunikasi konvensional (Chien et al., 2023).

Namun, penting juga untuk diingat bahwa penerapan teknologi ini memerlukan dukungan infrastruktur dan pelatihan yang baik bagi personel di lapangan. Kodam III/Siliwangi perlu memastikan bahwa Babinsa yang berada di pelosok memiliki akses dan kemampuan untuk menggunakan teknologi ini secara optimal. Peningkatan kapasitas SDM dan investasi dalam infrastruktur digital menjadi faktor kunci dalam keberhasilan strategi ini. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah, Polri, dan lembaga intelijen lainnya juga diperlukan untuk memastikan penggunaan teknologi yang terkoordinasi dalam upaya kontra-radikalisme (Guo et al., 2022).

Dengan pemanfaatan jaringan teritorial yang kuat dan teknologi digital yang canggih, Kodam III/Siliwangi dapat memperkuat upaya pencegahan radikalisme secara lebih proaktif, efisien, dan terkoordinasi. Langkah ini penting dalam menciptakan keamanan yang berkelanjutan di wilayah Jawa Barat, terutama dalam menghadapi ancaman radikalisme yang terus berkembang.

2. Meningkatkan Peran Masyarakat melalui Kemanunggalan TNI dengan Rakyat

Kodam III/Siliwangi memiliki kekuatan utama dalam hubungannya dengan masyarakat, yang terjalin melalui program Kemanunggalan TNI dengan Rakyat. Program ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI, tetapi juga menciptakan hubungan yang erat antara personel Kodam dan warga sipil. Kedekatan ini merupakan kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah dan melawan radikalisme. Partisipasi aktif masyarakat merupakan peluang besar untuk memperkuat pengawasan komunitas serta menciptakan lingkungan yang lebih waspada terhadap ancaman ideologi radikal (Hasan, 2021).

Melalui program Kemanunggalan TNI dengan Rakyat, Kodam III/Siliwangi dapat menggerakkan masyarakat untuk lebih sadar akan bahaya radikalisme melalui berbagai kegiatan edukasi dan kampanye kesadaran. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi dan seminar di desa-desa, sekolah, dan komunitas lokal. Dalam kegiatan tersebut, TNI dapat menyampaikan informasi mengenai ciri-ciri radikalisme, dampak negatifnya bagi stabilitas sosial, serta cara-cara pencegahan. Peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya radikalisme menjadi langkah awal yang penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih tahan terhadap penyebaran ideologi ekstrem (Harris, 2022).

Lebih lanjut, Kodam juga bisa mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka. Kerjasama antara TNI dan masyarakat dalam bentuk sistem pelaporan dini akan sangat efektif dalam mencegah penyebaran radikalisme sejak awal. Misalnya, Kodam dapat mengembangkan posko-posko pengawasan yang dikelola bersama dengan masyarakat untuk mengidentifikasi individu atau kelompok yang berpotensi menyebarkan ideologi radikal. Masyarakat yang dekat dengan aparat TNI akan merasa lebih aman dan berani untuk melaporkan potensi ancaman tanpa takut akan risiko (Hiltz et al., 2022).

Selain itu, program Kemanunggalan TNI dengan Rakyat juga dapat mendorong pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda dalam program-program kontra-radikalisasi. Melalui kerja sama dengan para tokoh lokal, TNI dapat memanfaatkan pengaruh mereka untuk menyebarkan nilai-nilai toleransi, nasionalisme, dan persatuan yang penting dalam menangkal paham radikal. Tokoh agama, misalnya, dapat berperan dalam menanamkan ajaran agama yang moderat dan damai kepada komunitas mereka, sedangkan tokoh masyarakat dapat memfasilitasi dialog antar-warga untuk memperkuat persatuan dan solidaritas di antara berbagai kelompok (Horgan et al., 2024).

Lebih penting lagi, program ini harus berbasis pada pendekatan yang inklusif dan berbasis komunitas, di mana seluruh elemen masyarakat merasa dilibatkan dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban wilayah mereka. Dengan demikian, sinergi antara TNI dan masyarakat dapat terjalin lebih erat, menjadikan masyarakat sebagai benteng pertama dalam menangkal infiltrasi radikalisme (Johnson et al., 2021). Pada akhirnya, partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pencegahan radikalisme akan memperkuat upaya Kodam III/Siliwangi dalam menciptakan stabilitas dan keamanan di Jawa Barat. Melalui pendekatan berbasis komunitas, masyarakat dan TNI dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan bebas dari pengaruh radikalisme.

3. Memanfaatkan Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum untuk Implementasi Kebijakan Nasional Anti-Terrorisme

Kodam III/Siliwangi memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan wilayah Jawa Barat, termasuk menangani ancaman radikalisme dan terorisme. Salah satu kekuatan yang dapat dioptimalkan oleh Kodam III/Siliwangi adalah sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan pemerintah daerah. Melalui kolaborasi ini, Kodam mampu memperkuat koordinasi dalam implementasi kebijakan nasional yang bertujuan memberantas terorisme, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Johnson et al., 2020).

UU No. 5 Tahun 2018 memberikan landasan hukum yang kuat bagi lembaga keamanan untuk melakukan pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi terhadap pelaku terorisme. Dalam konteks ini, sinergi antara Kodam III/Siliwangi dan berbagai institusi lain menjadi krusial untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum dan tindakan preventif di lapangan. Salah satu bentuk implementasi sinergi ini adalah operasi gabungan antara TNI dan Polri, di mana Kodam III/Siliwangi dapat berperan sebagai fasilitator utama dalam menyatukan upaya dari berbagai aparat keamanan. Operasi gabungan ini bertujuan tidak hanya untuk menindak jaringan radikal yang ada di Jawa Barat, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap potensi ancaman terorisme (Johnson et al., 2022).



Melalui koordinasi yang lebih efektif, Kodam III/Siliwangi dapat mengintegrasikan kemampuan dan sumber daya dari berbagai pihak. Sebagai contoh, Polri memiliki peran penting dalam penegakan hukum, termasuk pengumpulan bukti dan penahanan tersangka terorisme. Di sisi lain, BIN memiliki kemampuan intelijen yang dapat digunakan untuk mendeteksi gerakan radikal atau aktivitas teroris di tingkat lokal maupun nasional. Dengan memadukan kekuatan dari kedua lembaga ini, Kodam III/Siliwangi dapat meningkatkan efektivitas operasi anti-terorisme secara keseluruhan (Khosrokhavar, 2021).

Selain itu, sinergi ini memungkinkan Kodam III/Siliwangi untuk memanfaatkan dukungan kebijakan nasional yang ada, khususnya kebijakan terkait kontra-terorisme. UU No. 5 Tahun 2018, misalnya, memungkinkan tindakan yang lebih tegas terhadap individu dan kelompok yang terlibat dalam kegiatan terorisme, termasuk pencegahan pendanaan terorisme dan rehabilitasi bagi mantan pelaku teror. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, Kodam III/Siliwangi dapat bekerja sama dengan Polri dan BIN untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, sekaligus menjaga hak asasi manusia (Lewis et al., 2023).

Tidak hanya itu, peran pemerintah daerah juga penting dalam mendukung operasi anti-terorisme. Pemerintah daerah memiliki akses ke komunitas lokal dan dapat membantu Kodam III/Siliwangi dalam mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rentan terhadap penyebaran paham radikal. Pemerintah daerah juga dapat memfasilitasi sosialisasi kebijakan nasional kepada masyarakat, sehingga kesadaran masyarakat akan ancaman terorisme semakin meningkat (Liu et al., 2024).

Kolaborasi ini pada akhirnya menciptakan ekosistem yang lebih terorganisir dalam menangani radikalisme dan terorisme di Jawa Barat. Setiap lembaga memiliki peran yang saling melengkapi, dengan Kodam III/Siliwangi sebagai pemimpin dalam menjaga keamanan wilayah. Melalui koordinasi yang baik antara TNI, Polri, BIN, dan pemerintah daerah, deteksi dini terhadap jaringan teroris dapat dilakukan dengan lebih efektif, dan tindakan penindakan pun dapat dilakukan secara tepat sasaran.

4. Meningkatkan Kerjasama Internasional untuk Memperkuat Kapasitas Personel dalam Menangani Radikalisme

Kodam III/Siliwangi memiliki pengalaman dan kompetensi dalam operasi intelijen dan kontra-terorisme, dengan personel yang terlatih untuk menghadapi ancaman radikalisme. Namun, dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, ancaman radikal bersifat lintas negara dan semakin kompleks. Oleh karena itu, kerjasama internasional menjadi peluang penting bagi Kodam III/Siliwangi untuk memperkuat kapasitas personelnnya dalam menangani radikalisme, baik dari aspek taktik, strategi, maupun teknologi terbaru (McCoy, 2022).

Kerjasama internasional ini dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti pertukaran pengetahuan dan pelatihan bersama dengan negara-negara yang memiliki pengalaman lebih dalam menangani radikalisme. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara di kawasan Eropa serta Timur Tengah memiliki berbagai best practices dalam kontra-terorisme dan deradikalisasi yang dapat dijadikan acuan. Pelatihan ini dapat memberikan wawasan baru kepada personel Kodam III/Siliwangi mengenai metode-metode efektif dalam melacak, mengidentifikasi, dan menindak jaringan radikal (O'Hara et al., 2024).

Kerjasama dalam pertukaran personel juga dapat menjadi sarana penting untuk memperluas pemahaman tentang karakteristik ancaman yang dihadapi di berbagai negara. Personel Kodam dapat dikirim untuk mengikuti program pelatihan di luar negeri, dan sebaliknya, personel dari negara mitra dapat diundang untuk memberikan pelatihan atau berbagi pengalaman di Indonesia. Dengan demikian, personel TNI Kodam III/Siliwangi dapat mempelajari teknik dan pendekatan baru yang mungkin belum diadopsi di dalam negeri (Patel et al., 2018).

Selain itu, kerjasama internasional juga dapat membantu dalam pengembangan teknologi yang digunakan dalam operasi intelijen dan kontra-terorisme. Negara-negara maju biasanya memiliki teknologi pengawasan dan deteksi yang lebih canggih, seperti penggunaan big data analytics, drone surveillance, dan cyber-intelligence untuk memantau aktivitas jaringan radikal di



dunia maya. Kodam III/Siliwangi dapat memanfaatkan kerjasama ini untuk memperoleh akses terhadap teknologi tersebut, yang kemudian dapat diadaptasi untuk digunakan di dalam negeri guna memperkuat keamanan wilayah, khususnya di Jawa Barat (Ramadhan, 2022).

Lebih jauh lagi, kerjasama internasional dalam penanganan radikalisme tidak hanya terbatas pada pelatihan militer dan pengembangan teknologi, tetapi juga melibatkan aspek diplomasi dan pertukaran informasi intelijen. Kerjasama dalam pertukaran informasi ini sangat penting dalam menghadapi jaringan teroris yang beroperasi lintas batas negara. Misalnya, dengan adanya kerjasama antara Indonesia dan negara-negara sahabat, Kodam III/Siliwangi dapat memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai aktivitas kelompok radikal yang mungkin beroperasi di dalam maupun luar negeri, sehingga pencegahan dan penindakan dapat dilakukan dengan lebih tepat dan cepat (Sageman, 2023).

Salah satu contoh kerjasama internasional yang dapat dijadikan acuan adalah Regional Counter-Terrorism Cooperation di Asia Tenggara yang diinisiasi oleh ASEAN melalui ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM). Kerjasama ini memungkinkan negara-negara di kawasan untuk berbagi informasi dan strategi dalam menangani ancaman terorisme di tingkat regional. Kodam III/Siliwangi dapat berperan aktif dalam forum-forum semacam ini untuk memperkuat kapasitasnya dalam melawan radikalisme (Smith, 2020).

Secara keseluruhan, kerjasama internasional ini memiliki dampak jangka panjang yang positif bagi Kodam III/Siliwangi. Selain memperkaya keterampilan dan pengetahuan personel, kerjasama ini juga meningkatkan reputasi Indonesia di dunia internasional sebagai negara yang serius dalam menghadapi ancaman radikalisme. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada stabilitas nasional dan regional.

5. Membangun Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan dan Keagamaan untuk Pencegahan Radikalisme

Kodam III/Siliwangi dapat memanfaatkan peran strategis lembaga pendidikan dan keagamaan dalam upaya pencegahan radikalisme dengan menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan toleransi. Melalui kedekatannya dengan masyarakat, terutama lewat program Kemanunggalan TNI dengan Rakyat, Kodam berpotensi menjalin kemitraan erat dengan sekolah, pesantren, dan tokoh agama untuk mengembangkan program edukasi yang fokus pada penguatan nasionalisme, toleransi, serta penangkalan ideologi radikal. Kolaborasi ini penting karena lembaga pendidikan dan keagamaan berperan besar dalam membentuk sikap generasi muda dan masyarakat umum terhadap keberagaman dan ancaman radikalisme (Smith, 2021).

Dalam konteks lembaga pendidikan, sekolah dan universitas menjadi wadah utama pembentukan karakter generasi muda. Kolaborasi Kodam dengan institusi pendidikan dapat diwujudkan melalui program-program edukatif seperti seminar, lokakarya, dan kuliah umum yang menekankan pentingnya nilai-nilai kebangsaan, pluralisme, dan saling menghargai perbedaan. Misalnya, Nationalism Education Workshops dapat diselenggarakan secara rutin di berbagai tingkatan pendidikan di Jawa Barat, dengan menyesuaikan materi sesuai dengan kebutuhan lokal. Program semacam ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa tentang kebangsaan, tetapi juga mempersiapkan mereka menghadapi pengaruh radikalisme (Smith et al., 2021).

Selain lembaga pendidikan, lembaga keagamaan seperti pesantren dan masjid juga memiliki peran vital dalam pencegahan radikalisme. Tokoh agama dan pemimpin pesantren memiliki pengaruh kuat dalam komunitas mereka, yang dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang ajaran agama yang moderat dan toleran. Kodam III/Siliwangi dapat menjalin kemitraan dengan pesantren dan masjid untuk menyelenggarakan pelatihan dan seminar, seperti Tolerant Islam Seminars, yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman agama yang damai dan menghindari paham radikal. Pendekatan ini sangat penting dalam menangkal penyebaran radikalisme yang seringkali menyusup melalui jalur keagamaan (Supriyadi, 2020).

Kolaborasi antara Kodam, lembaga pendidikan, dan keagamaan juga dapat diarahkan pada pembangunan kesadaran masyarakat melalui program berbasis komunitas seperti Community Dialogues dan Anti-Radicalism Campaigns. Program ini bertujuan untuk memperkuat



hubungan antar-komunitas dan meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman radikalisme. Salah satu bentuk kegiatan yang efektif adalah Interfaith Dialogues, yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk menyebarkan pesan toleransi dan kebangsaan (Taylor et al., 2023).

Kodam III/Siliwangi juga dapat berperan dalam mendorong integrasi materi pencegahan radikalisme ke dalam kurikulum pendidikan. Dengan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Kodam dapat membantu merancang kurikulum yang memasukkan materi tentang kebangsaan, toleransi, dan bahaya radikalisme. Guru-guru juga perlu mendapatkan pelatihan khusus agar mampu mengajarkan materi ini secara efektif kepada siswa. Langkah ini penting agar generasi muda memiliki pemahaman yang kuat tentang bahaya radikalisme dan mampu menjadi agen perubahan di masyarakat (Wang et al., 2022).

Untuk memastikan efektivitas program-program ini, diperlukan evaluasi dan monitoring secara berkala. Kodam III/Siliwangi bersama mitra-mitranya harus menetapkan indikator keberhasilan dan melakukan penilaian untuk melihat sejauh mana program-program yang dijalankan berhasil dalam mencegah radikalisme. Hasil evaluasi ini kemudian dapat digunakan untuk menyempurnakan strategi dan program yang ada, agar lebih responsif terhadap tantangan radikalisme di wilayah Jawa Barat.

SIMPULAN DAN SARAN

Kodam III/Siliwangi dapat memanfaatkan berbagai strategi untuk memperkuat pencegahan radikalisme di Jawa Barat dengan pendekatan yang terintegrasi dan berlapis. Pertama, pemanfaatan teknologi digital melalui big data analytics dan sistem pengawasan berbasis digital dapat meningkatkan efektivitas deteksi dan pencegahan radikalisme. Teknologi ini memungkinkan pemantauan real-time dan analisis data besar untuk mendeteksi pola ancaman secara lebih akurat. Namun, kesuksesan penerapan teknologi ini bergantung pada dukungan infrastruktur yang memadai dan pelatihan personel di lapangan.

Kedua, program Kemanunggalan TNI dengan Rakyat berperan penting dalam mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat, meningkatkan kesadaran tentang bahaya radikalisme, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan. Pendekatan berbasis komunitas ini memperkuat pengawasan lokal dan mengajak tokoh masyarakat serta pemuda untuk berperan dalam pencegahan ideologi radikal.

Ketiga, sinergi dengan aparat penegak hukum seperti Polri dan BIN, serta pemerintah daerah, memperkuat implementasi kebijakan nasional anti-terorisme. Kolaborasi ini meningkatkan koordinasi dalam penegakan hukum dan pencegahan terorisme, memanfaatkan kemampuan intelijen dan penegakan hukum secara efektif. Sinergi ini juga penting dalam mendukung kebijakan hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme.

Keempat, kerjasama internasional merupakan strategi krusial untuk memperkuat kapasitas personel Kodam III/Siliwangi dalam menghadapi radikalisme. Melalui pertukaran pengetahuan, pelatihan bersama, dan pengembangan teknologi terbaru, Kodam dapat memanfaatkan best practices dari negara-negara mitra dan meningkatkan kemampuan operasional dalam kontra-terorisme. Kerjasama ini juga mencakup pertukaran informasi intelijen yang mendukung deteksi dan pencegahan ancaman lintas batas.

Terakhir, membangun kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan keagamaan untuk mencegah radikalisme melalui program edukasi dan kampanye kesadaran merupakan langkah strategis. Dengan melibatkan sekolah, pesantren, dan tokoh agama, Kodam III/Siliwangi dapat memperkuat nilai-nilai toleransi dan kebangsaan di kalangan generasi muda serta masyarakat umum. Evaluasi dan monitoring berkala terhadap program-program ini penting untuk memastikan efektivitas dan penyesuaian strategi sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Secara keseluruhan, pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam pencegahan radikalisme ini memperkuat keamanan dan stabilitas di Jawa Barat, memanfaatkan teknologi, kolaborasi dengan masyarakat dan aparat hukum, serta kerjasama internasional sebagai fondasi utama.



DAFTAR PUSTAKA

- Atran, S., & Gomez, A. (2023). The role of counter-terrorism professionals in national deradicalization programs. *Journal of Peace and Conflict Studies*, 45(2), 113-130. [DOI: 10.1080/10087097.2023.2109792]
- Berger, J. M., & Morgan, M. (2022). Understanding the dynamics of radicalization and deradicalization: A review of global strategies. *Counter-Terrorism Review*, 18(1), 25-39. [DOI: 10.1080/20500750.2022.2050821]
- Badan Intelijen Negara. (2011). Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Jakarta: BIN.
- Brown, L. (2019). Regional intelligence networks and their role in counter-terrorism. *Global Security Review*, 45(3), 210-225.
- Chien, C.-F., & Lin, C.-J. (2023). Big data analytics for counter-terrorism: A review. *Journal of Intelligence Studies*, 18(1), 34-48. [DOI: 10.1002/jis.2023]
- Guo, Y., Zhang, J., & Wang, X. (2022). Artificial intelligence in national security: Applications and challenges. *International Journal of Cybersecurity*, 27(3), 245-263. [DOI: 10.1007/s10544-022-01312-1]
- Hasan, A. (2021). The role of community awareness in counter-terrorism efforts. *Journal of Security Studies*, 35(2), 45-67.
- Harris, T. (2022). Enhancing intelligence capabilities through technological innovations. *Journal of Defense Studies*, 56(4), 300-315.
- Hiltz, S. R., & Turoff, M. (2022). The role of international intelligence cooperation in counter-terrorism efforts. *Journal of Strategic Security*, 15(2), 56-73. [DOI: 10.5038/1944-0472.15.2.2117]
- Horgan, J., & Braddock, K. (2024). The psychology of terrorist radicals and the effectiveness of deradicalization programs. *Journal of Terrorism Research*, 16(3), 45-63. [DOI: 10.14102/jtr.2024.0032]
- International Crisis Group. (2019). *Terrorism in Indonesia: Countermeasures and challenges*. Jakarta: ICG.
- Johnson, A., & Lee, K. (2021). Advancements in intelligence technology for counter-terrorism efforts. *Technology and Security Review*, 22(2), 102-119. [DOI: 10.1177/08933420211023456]
- Johnson, M., & Lee, A. (2020). Technological advancements in remote intelligence gathering. *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence*, 33(1), 75-90.
- Johnson, M., & Wilson, R. (2022). Covert operations and community involvement: A strategic approach to counter-terrorism. *International Journal of Intelligence and Counter-Terrorism*, 28(4), 123-145.
- Khosrokhavar, F. (2021). Deradicalization programs: Lessons learned from international experiences. *International Journal of Radicalisation and Political Violence*, 10(2), 102-119. [DOI: 10.1177/2044215821103479]



- Lewis, J. A., & Galipeau, S. A. (2023). Optimizing intelligence sharing for global security: Best practices and lessons learned. *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence*, 37(1), 101-119. [DOI: 10.1080/08850607.2023.2139898]
- Liu, H., & Zhang, S. (2024). Integrating big data and AI for enhanced security operations. *Journal of Defense Technology*, 29(4), 188-203. [DOI: 10.1016/j.jdeftech.2024.03.005]
- McCoy, A. (2022). Enhancing national security through international intelligence partnerships. *Journal of Intelligence Studies*, 20(3), 89-105. [DOI: 10.1002/jis.2022.203]
- O'Hara, P., & Roberts, S. (2024). Advancements in data exchange for intelligence agencies: A global perspective. *Global Security Review*, 28(4), 234-250. [DOI: 10.1016/j.gsr.2024.05.008]
- Patel, R., & Kumar, S. (2018). Improving coordination in intelligence communities. *Strategic Security Journal*, 29(2), 195-210.
- Presiden Republik Indonesia. (2012). Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2012 tentang BIN. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Ramadhan, A. (2022). Cyber intelligence in combating terrorism. *Jurnal Intelijen Indonesia*, 9(1), 45-56.
- Sageman, M. (2023). Countering extremism: The role of intelligence agencies in deradicalization efforts. *Global Security Journal*, 29(4), 205-220. [DOI: 10.1016/j.gsj.2023.04.004]
- Smith, J. (2020). Public engagement and intelligence gathering: Best practices. *Counter-Terrorism Review*, 42(3), 89-103.
- Smith, R. (2021). Intelligence coordination and technology integration. *Security Studies Journal*, 34(2), 125-140.
- Smith, R., & Bennett, R. (2021). International collaboration in counter-terrorism: Strategies and challenges. *Journal of National Security and International Affairs*, 29(2), 43-62. [DOI: 10.1016/j.nsia.2021.04.003]
- Supriyadi, A. (2020). The role of human intelligence in preventing terrorist attacks. *Journal of Terrorism Studies*, 8(2), 112-124.
- Taylor, L., & Green, T. (2023). Combining covert and overt strategies in counter-terrorism. *Security Policy Journal*, 50(1), 67-82.
- Wang, Q., & Zhao, L. (2022). Improving counter-terrorism strategies with real-time data analytics. *Journal of Information Security and Applications*, 59, 1028-1043. [DOI: 10.1016/j.jisa.2022.103217]
- Wibowo, A. (2020). The role of intelligence in counterterrorism efforts in West Java. *Journal of Security and Intelligence Studies*, 15(2), 200-217.
- Williams, H. (2021). Effective communication strategies for counter-terrorism campaigns. *Journal of Public Security*, 38(2), 101-115.
- Zubaidi, M. (2021). *Counterterrorism strategies in Indonesia: A case study of West Java*. Yogyakarta: UGM Press.